

**REVITALISASI JATI DIRI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
MENGHADAPI PERUBAHAN GLOBAL**



oleh:  
Rektor Universitas Gadjah Mada

**PIDATO  
DIES NATALIS KE-55 UNIVERSITAS GADJAH MADA  
20 DESEMBER 2004**

Yang terhormat  
Bapak dan Ibu Menteri Kabinet Indonesia Bersatu  
Bapak dan Ibu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia  
Bapak dan Ibu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Republik Indonesia  
Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Pimpinan dan Para Anggota Majelis Wali Amanat  
Pimpinan dan para Anggota Senat Akademik  
Pimpinan dan para anggota Majelis Guru Besar  
Para pejabat sipil dan militer,  
Para tamu undangan, hadirin dan hadirat yang kami muliakan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua.*

Pada puncak acara Dies Natalis Universitas Gadjah Mada 2004 marilah kita mengheningkan cipta sejenak untuk me-nge-nang para pendiri dan para tokoh pendidikan yang telah mendahului kita. Pemikiran-pemikiran cemerlang dan suri tauladan para pendahulu tersebut marilah kita pelihara, kita suburkan dan kita jadikan sumber inspirasi dalam mengemban tugas dan meneruskan misi suci sebagai lembaga pencerdas bunga-bunga bangsa dan sumber inspirasi bagi rakyat. Mari kita doakan semoga arwah para pendahulu kita tersebut mendapat tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Yang Maha Pengasih. Amin.

Tepat setengah tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Februari 1946, beberapa cende-kiawan yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan men-dirikan perguruan tinggi swasta bernama Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada di Yogyakarta. Peresmian BPT Gadjah Mada diadakan pada 3 Maret 1946, dimulai dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Kesusasteraan, 16 mahaguru dan 430 mahasiswa. Tahun 1946-1948 dapat dipandang sebagai masa-masa amat penting bagi pembangunan pendidikan tinggi di Indonesia, karena dalam kurun waktu 2 tahun tersebut Pemerintah Republik Indonesia yang mengungsi ke Yogyakarta telah mendirikan Sekolah Tinggi Teknik dan Akademi Ilmu Politik di Yogyakarta. Di Klaten berdiri Perguruan Tinggi Kedokteran, Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan, dan Perguruan Tinggi Pertanian, dan di Solo berdiri Perguruan Tinggi Kedokteran (Bagian Klinik) dan Balai Pendidikan Hukum.

Tak lama setelah BPT Gadjah Mada resmi beroperasi, pada 1 Mei 1946, Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Dewan Kurator mengajukan surat kepada Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mendapatkan pengesahan (Sardjito dan Johannes, tt:4-5). Pada 1949 Pemerintah menetapkan untuk menggabungkan BPT Gadjah Mada dengan beberapa perguruan tinggi negara di Yogyakarta, Klaten dan Solo, dan mendirikan Universitas Negeri Gadjah Mada. Pada waktu menetapkan hari kelahiran Universitas Gadjah Mada, Presiden Soekarno menyatakan "... tanggal 19 Desember 1949 dipilih sebagai hari kelahiran Universitiit Negeri Gadjah Mada untuk memperlihatkan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat. Meskipun diserang oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, dalam waktu satu tahun bangsa Indonesia telah mampu bangkit kembali. Kebangkitan bangsa Indonesia kita tunjukkan dengan mendirikan sebuah universitas karena kekuatan suatu bangsa amat ditentukan oleh kemampuan lembaga pendidikan tinggi dalam mencerdaskan bunga-bunga bangsa dan sekaligus sebagai sumber inspirasi bagi rakyat".

*Para hadirin yang saya muliakan*

Melalui pendirian Universitas Gadjah Mada, para *found-ing fathers* ingin menunjukkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah memasuki babak baru. Perjuangan memper-tahankan kemerdekaan secara fisik melalui perjuangan bersen-jata dianggap telah selesai. Tahap selanjutnya adalah mengisi kemerdekaan tersebut dengan perjuangan melawan kemis-kinan, kemelaratan, dan kebodohan melalui tindakan yang dijiwai oleh asas Ketuhanan, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial, yang merupakan suatu totalitas yang terangkum dalam Falsafah Dasar Pancasila.

Dalam pandangan Profesor Notonagoro (dalam Mubyarto, 2004:45), upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai perwujudan asas perikemanusiaan yang adil dan beradab, dan bersama semua asas yang terkandung dalam Pancasila merupakan landasan ideologis kegiatan pendidikan, pengaja-ran dan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan bangsa Indonesia. Pandangan tersebut dipertegas dalam Pasal 2 UU No. 22 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang menyatakan "pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Pada Pasal 7 ayat (1) tentang Penetapan UGM sebagai Badan Hukum Milik Negara ditetapkan bahwa UGM diselenggarakan berdasarkan atas asas keuniversalan dan keobjektifan ilmu pengetahuan dalam mencapai kenyataan dan kebenaran, kebebasan akademik yang dilaksanakan secara bertanggung-jawab, keadaban, kemanfaatan, kebahagiaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan, serta asas kerohanian, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan kemasyarakatan, sebagaimana dicantumkan dalam falsafah dasar negara.

Selama 55 tahun menjalankan misi Tridarmanya, telah banyak prestasi yang diraih oleh Universitas Gadjah Mada dalam mengamalkan asas kerohaniannya tersebut. Berbagai nama dan julukan yang diberikan masyarakat kepada Universitas Gadjah Mada sebagai Universitas Kerakyatan, Universitas Perjuangan dan Universitas Nasional, dapat dipandang sebagai pengakuan atas komitmennya yang kuat pada nilai-nilai dasar tersebut. Seperti disampaikan oleh Profesor Sardjito pada Pidato Dies Natalis VI, Universitas Gadjah Mada telah menetapkan pandangan teleologis bahwa nilai-nilai Pancasila adalah falsafah hidup dan pendirian hidup universitas perjuangan ini. Dengan demikian, dalam melaksanakan kegiatan untuk mengungkapkan kenyataan dan kebenaran, obyektivitas dan universalitas ilmu pengetahuan, Universitas Gadjah Mada harus selalu berusaha melakukannya selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Yang menjadi pertanyaan saat ini, setelah lebih dari setengah abad menjalankan misi tersebut, seberapa jauh cita-cita para pendiri Universitas Gadjah Mada tersebut telah berhasil dilaksanakan? Menghadapi berbagai perubahan yang sedang dan akan terjadi pada tataran nasional dan global, apakah nilai-nilai atau Jati Diri Universitas Gadjah Mada tersebut masih tetap relevan untuk mendukung pelaksanaan misi Universitas Gadjah Mada dalam mencerdaskan bunga-bunga bangsa dan sebagai sumber inspirasi bagi rakyat Indonesia? Apakah untuk menghadapi tantangan perubahan global yang terjadi saat ini dan di masa depan, bangsa Indonesia harus meniru apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa maju dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan, ibarat usaha fotokopi (*xeroxing*), atau sebaliknya kita harus memiliki keberanian untuk menempuh 'jalan sendiri' dengan memperhatikan keadaan dunia dan prediksi tentang masa depan?

Untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut perkenankan saya mengawali penyampaian orasi ilmiah berjudul "*Revitalisasi Jati Diri Universitas Gadjah Mada Menghadapi Perubahan Global*" ini dengan penyajian singkat tentang nilai-nilai yang menjadi landasan dan orientasi Universitas Gadjah Mada sejak awal kelahirannya. Sesudah itu berturut-turut akan saya sampaikan pembahasan tentang tantangan Universitas Gadjah Mada di era perubahan global, globalisasi dan komodifikasi pengetahuan dan teknologi, revolusi perkembangan teknologi informasi dan munculnya isu atau bahkan mitos kematian universitas (*the end of university*). Universitas Gadjah Mada arus melakukan kontekstualisasi dan revitalisasi atas komitmennya pada nilai-nilai yang telah dipilih sejak awal kelahirannya guna menghadapi tekanan perubahan global yang sangat dahsyat saat ini dan di masa depan. Penyajian ini akan saya tutup dengan eksplorasi tentang implikasi kebijakan-kebijakan universitas untuk mengukuhkan kembali peran dan fungsinya sebagai sebuah "*culture-conserving*", "*culture-creating*" dan "*civilizing institution*".

*Para hadirin yang saya muliakan.*

### **Jati diri Universitas Gadjah Mada**

Untuk mengawali penyajian orasi ini saya merasa perlu untuk sekali lagi mengingatkan semua yang hadir di ruangan ini bahwa identitas dan jati diri Universitas Gadjah Mada sebagai universitas perjuangan, universitas kerakyatan, universitas Pancasila, dan identitas-identitas yang lain memiliki akarnya dalam sejarah kelahirannya. Seperti sudah saya kemukakan di atas, Universitas Gadjah Mada didirikan sebagai peringatan penyerbuan tentara Belanda ke ibu kota Republik Indonesia. Ia didirikan di masa perjuangan kemerdekaan, seminggu sebelum Belanda menyerah. Ia didirikan dengan sebuah idealisme. Tak ada studi kelayakan, tak ada modal uang yang cukup untuk lima tahun pertama, juga tak ada fasilitas yang pantas untuk sebuah universitas, dengan jumlah dosen yang tidak mencukupi, sebagian diantaranya adalah pejuang-pejuang dalam revolusi fisik, seperti juga para mahasiswanya. Dosen harus merangkap matakuliah, sementara peralatan dan bahan laboratorium harus diimprovisasi, sebagian bahkan harus diungsikan. Universitas Gadjah Mada didirikan sebagai gabungan beberapa perguruan tinggi swasta dan milik pemerintah. Sesudah Pemerintah Pusat pindah kembali ke Jakarta, pegawai negeri yang tidak ikut dipindahkan ditampung oleh Universitas Gadjah Mada yang merupakan universitas nasional dan oleh pemerintah negara bagian Republik Indonesia.

Dengan demikian kita lihat bahwa identitas Universitas Gadjah Mada adalah universitas perjuangan nasional melawan kolonialisme, imperialisme dan ketidakadilan sosial yang ditimbulkannya. Seperti tercantum dalam Statuta pertamanya, Universitas Gadjah Mada merupakan alat untuk persatuan nasional, yang juga tercermin dalam masyarakat mahasiswanya yang berasal dari berbagai daerah dan pulau. Sebagai universitas, perjuangan

selanjutnya adalah memba-ngun ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kemanusiaan. Universitas adalah tempat bertanya, kreator dan inovator, penyebar dan pengawal kebudayaan, serta pelestari vitalitas bangsa. Di awal perjalanannya waktu itu, mahasiswa belajar dengan bebas, tidak dipungut sumbangan dan menurut temponya masing-masing (*self-paced*).

Nasionalisme Universitas Gadjah Mada terlihat pula pada keengganannya menerima dosen-dosen kolaborator Belanda, dan pada ketetapan hati untuk memilih sistem sendiri dengan tidak mengabaikan asimilasi unsur-unsur dari kebudayaan lain, bahkan sejak awal telah mempekerjakan dosen-dosen asing, yang sedapat-dapatnya memberi kuliah dalam bahasa Indonesia, asal pengajaran mereka tidak bertentangan dengan Pancasila, yang menjadi dasar dan pedoman Universitas Gadjah Mada sejak dari awal sejarahnya. Segala mata kuliah seyogyanya dikembangkan dengan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, baik ekonomi, kedokteran, pedagogi, dan lain-lain. Tidak ada matakuliah Pancasila bagi semua fakultas, tetapi semua disiplin diresapi dan dibimbing oleh Pancasila.

Promosi doktoral maupun honoris causa membayangkan integrativitas dan multidisiplinartas Universitas Gadjah Mada, misalnya tentang agama dan kedokteran, teknik dan kebuda-yaan, dan lain-lain. Disamping obyektivitas atau inter-subjektivitas ilmiah, Universitas Gadjah Mada memperlihatkan ciri keberpihakan pada yang lemah dalam perkembangan ilmu terapan serta tidak berorientasi pada uang.

Dengan singkat dapat disimpulkan bahwa Universitas Gadjah Mada mengesankan identitasnya dengan:

1. Dasar Pancasila yang meresap dalam setiap disiplin dan sikapnya.
2. Dalam mencipta, mengembangkan, menerapkan dan menyebarkan ilmu dan kebudayaan, Universitas Gadjah Mada:
  - a. memelihara keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan internasional;
  - b. produknya mencerminkan kebudayaan Indone-sia;
  - c. memperhatikan kenyataan, kebenaran, keindahan dan kemanusiaan sebagai dasar kebudayaan;
  - d. bersikap flexibel, banyak akal (*resourceful*), improvisatoris, *versatile*, dan berwawasan luas;
  - e. berinisiatif sendiri untuk berbakti bagi kesejahteraan dan perdamaian dunia;
  - f. mempunyai percaya diri yang besar.
3. Demokrasi pendidikan, sehingga pemuda-pemuda yang intelegensinya mampu harus dapat mengecap pendidikan tinggi.
4. Menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan untuk mencapai kemakmuran.
5. Lulusan Universitas Gadjah Mada harus merasa berkewajiban menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
6. Lulusan harus dapat menghargai pahlawan-pahlawan ilmu dan budaya.

*Para hadirin yang saya muliakan*

Dalam perjalanan sejarah Universitas Gadjah Mada sampai sekarang, memang ada ciri-ciri khasnya yang aus dan terkikis, terlupakan, belum terlaksanakan atau terdesak oleh gejolak-gejolak perubahan nasional dan global, baik politis, ekonomis, sosial dan teknologis. Sekarang ciri-ciri itu harus dibangkitkan kembali. Ciri-ciri identitas tersebut tentu harus disesuaikan dan diselaraskan dengan perkembangan zaman, oleh karena banyak peristiwa telah terjadi dalam bidang demografi, ekologi, geo-politik, dan geo-ekonomi, intensitas interaksi antara bangsa, dan dominasi aliran politik ekonomi tertentu, perkembangan ilmu dan teknologi, serta tentu saja semangat zaman.

Generasi pengasuh Universitas Gadjah Mada selanjutnya telah berusaha melahirkan pikiran-pikiran baru atau yang diderivasi dari pikiran-pikiran yang mendasari kelahirannya, dalam menghadapi berbagai perubahan menco-ba menjadi pengawal (*gatekeepers*) kebudayaan bangsanya dengan keberhasilan yang bervariasi. Usaha memelihara identitas Universitas Gadjah Mada akan dilakukan terus menerus sebagai kewajiban warisan yang tak ada ujungnya. Beruntung, semua itu dapat dilakukan oleh karena Universitas Gadjah Mada berada di kota kebudayaan Yogyakarta, sehingga relatif lebih mudah menghadapi gelombang-gelombang baru yang menghanyutkan segalanya ke arah pos-industrialisme dan pos-modernisme, bahkan pos-struktural-isme serta hegemoni tunggal suatu bangsa.

*Para hadirin yang sangat saya hormati.*

### **Universitas Gadjah Mada menghadapi perubahan global**

Semua itu menunjukkan bahwa sejak awal para pendiri Universitas Gadjah Mada dengan tegas meletakkan landasan idiil dan filosofis pembangunan dan pengembangan identitas dan jati diri Universitas ini dalam konteks kesinam-bungan dan keberlanjutan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam Pidato Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa kepada Ki Hadjar Dewantara pada tanggal 19 Desember 1956, misalnya, Prof. Sardjito menyatakan bahwa seperti halnya dengan misi perjuangan Ki Hadjar Dewantara, maka misi perjuangan Universitas Gadjah Mada meliputi tiga kawasan perjuangan berikut: perjuangan kemerdekaan nasional, perjuangan pendidikan,

dan perjuangan kebudayaan. Di bawah tekanan penetrasi ekspansi globalisasi kapitalisme neo-liberal yang sangat dahsyat saat ini, saya berpendapat bahwa tri-tunggal misi perjuangan Universitas Gadjah Mada tersebut bukan hanya masih sangat relevan akan tetapi bahkan harus semakin kita pahami sebagai sebuah imperatif. Melalui peran dan fungsinya sebagai "*culture-conserving*", "*culture-creating*" dan "*civilizing institution*", yang hak hidupnya bersumber dari kancah perjuangan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia (Sardjito, 1960), Universitas Gadjah Mada harus semakin bersungguh-sungguh berupaya untuk mewujudkan komitmen perjuangannya membebaskan bangsa dan negara Republik Indonesia dari segala bentuk penindasan, ketidakadilan, dan dehumanisasi. Tentu saja dengan sebuah catatan bahwa pengungkapannya harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan dinamika perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan.

Semua itu juga membuktikan bahwa sejak awal para pendiri Universitas Gadjah Mada telah memiliki pemahaman yang melampaui dasar-dasar pemikiran dari ideologi-ideologi pendidikan yang dikenal di dunia saat ini. Pertama, meskipun mereka percaya dan menerima nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fondasi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional kita, namun mereka tidak terperangkap ke dalam paham *fundamentalisme pendidikan* yang menolak pertimbangan-pertimbangan filosofis dan/atau intelektual. Sebaliknya mereka menerima tanpa daya kritik konsep-konsep "kebenaran" yang diwahyukan atau konsensus sosial dari masa lalu yang sudah mapan, serta menganggap bahwa tujuan pendidikan tidak lebih dari pelestarian dan keberlanjutan pola-pola sosial dan tradisi-tradisi masa lalu (baca: O'niel, 1981 dan 2001; baca juga Nelson, Carlson dan Palonsky, 1996). Prof. Sardjito (1956) dengan tegas mengungkapkan hal itu ketika dalam pidato dies Universitas Gadjah Mada yang ke 7, sekali lagi mengutip pemikiran Ki Hadjar Dewantara, ia menyatakan bahwa disamping *pendidikan budi pekerti* yang memang sangat diperlukan untuk meningkatkan keluhuran hidup batin anak atau subyek didik, akan tetapi diperlukan juga *pendidikan fikiran* untuk meningkatkan kecerdasan fikiran yang harus dibangun setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya dan selebar-lebarnya bagi pembangunan peri-kehidupan lahir dan batin anak atau subyek didik dengan sebaik-baiknya.

Kedua, mendahului pandangan John Dewey (Bowles dan Gintis, 1976), seorang tokoh ahli pendidikan liberal terkemuka, yang baru pada pertengahan dasawarsa 1960-an menyatakan bahwa pendidikan harus diselenggarakan untuk mewujudkan fungsi "integratif" untuk mengintegrasikan anak atau subyek didik ke dalam berbagai peran kewarganegaraan, fungsi "*egalitarian*" untuk memberikan kepada semua warganegara kesempatan memperoleh pendidikan, dan fungsi "*developmental*" bagi perkembangan psikis dan moral anak atau subyek didik untuk melakukan tanggapan yang seimbang terhadap nilai-nilai kehidupan kuantitatif dan kualitatif, sebaliknya sudah sejak dasawarsa 1940-an para pendiri Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa tujuan pendidikan di Indonesia harus diorientasikan untuk mewujudkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, internasionalisme atau kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial.

Ketiga, lebih dari semua itu, mendahului pemikiran para ahli pendidikan kritis yang dengan keras mengkritik sistem pendidikan kapitalis, para pendiri Universitas Gadjah Mada juga sudah sejak sangat dini mengingatkan kita akan bahaya masuknya sistem pendidikan kapitalis di dalam skalanya yang eksekutif di masa depan. Jikalau baru pada akhir dasawarsa 1970-an tokoh-tokoh pendidikan kritis seperti Juergen Habermas (1972), Paulo Freire (1972), dan Samuel Bowles dan Herbert Gintis (1976) menyatakan kritik-kritik mereka terhadap sistem pendidikan kapitalis, maka sudah sejak awal kelahiran Universitas Gadjah Mada pada akhir dasawarsa 1940-an para pendiri universitas ini telah mengingatkan kita akan hadirnya ancaman bahaya semakin menguatnya perkembangan pendidikan kapitalis di Indonesia di era globalisasi. Dalam *Pidato Peringatan Hari Pendidikan Nasional* di Taman Siswa pada tahun 1969, Prof. Sardjito dengan tegas menyatakan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia jikalau kita benar-benar tidak menghendaki masuknya nilai-nilai ekonomi kapitalis di dalam bentuknya yang tidak kita kehendaki ke dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Melalui pernyataannya itu ia memperingatkan kita bahwa:

*"..... bila Taman Siswa membuka Fakultas Ekonomi, sejogjanja Majelis Luhur Taman Siswa, mengadju-kan pertanjaan kepada dosen-dosennja, bagaimana mengetrapkan Pantjasila dimata-peladjaran Ekono-mi. Bila pertanjaan ini tidak diindahkan, mungkin dapat kedjadian kapitalistik ekonomi masuk di Taman Siswa".*

Lima tahun sebelum itu, dalam sebuah wawancara dengan Majalah Intisari, secara sangat eksplisit beliau bahkan sudah mengingatkan bahwa di dalam bentuknya yang masih sangat awal kala itu, kehadiran sistem kapitalisme di Indonesia ternyata sudah cukup memprihatinkan, ketika beliau menyatakan bahwa:

*"Jang merusak keadaan sekarang ini adalah manusia-manusia Indonesia jang berego kera. Mereka banjak bitjara sadja, pandai mengandjurkan ini-itu, akan tetapi tindakannya matjam tindakan kera, jakni mau mengambil terus-menerus, "srakah", kata orang Djawa".*

Di hadapan perubahan-perubahan global yang sangat dahsyat di bawah tekanan globalisasi neo-liberal saat ini dan di masa depan, beberapa pertanyaan sangat mendasar berikut tentang peluang aktualisasi identitas, jati diri dan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan kelahiran Universitas Gadjah Mada perlu memperoleh perhatian yang seksama. Pertama, bagaimana pilihan identitas, jati diri dan nilai-nilai tersebut kini dan di masa yang akan datang harus diwujudkan dan diaktualisasikan ke dalam praksis penyelenggaraan pendidikan di Universitas Gadjah Mada, ketika ekspansi globalisasi kapitalisme neo-liberal telah dan akan semakin berkembang di dalam dinamika dan karakternya yang sangat berbeda dari dinamika dan karakternya ketika pilihan identitas, jati diri dan nilai-nilai tersebut pertama kali dirumuskan? Kedua, benarkah globalisasi kapitalisme yang oleh Robertson (2003) disebut sebagai globalisasi gelombang ketiga itu menawarkan peluang yang lebih menjanjikan bagi Universitas Gadjah Mada untuk mewujudkan dan mengaktualisasikan pilihan identitas, jati diri dan nilai-nilainya di masa depan, sebagaimana yang mungkin diyakini oleh banyak ahli ekonomi? Ketiga, sejauh mana pilihan identitas, jati diri dan nilai-nilai yang telah dirumuskan dan menjadi obsesi para "*founding fathers*" universitas ini telah dengan jelas diakomodasi di dalam perumusan visi dan misi Universitas Gadjah Mada saat ini? Keempat, sejauh mana visi dan misi tersebut telah menjadi pemahaman dan obsesi seluruh civitas akademika universitas di dalam kaitannya dengan tantangan perubahan global yang tengah kita hadapi saat ini? Kelima, apakah struktur dan mekanisme kelembagaan universitas kita telah memiliki kapasitas yang diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskannya? Keenam, yang terakhir dan tidak kalah pentingnya, kebijakan-kebijakan universitas apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas itu? Pertanyaan-pertanyaan sangat mendasar itu pula yang hendak menjadi fokus perhatian penyajian pidato dies kali ini. Meskipun demikian, oleh karena pilihan tema dies kali ini, penyajian pidato dies ini hanya akan difokuskan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kedua, ketiga dan keenam, sementara pembahasan tentang pertanyaan keempat dan kelima hanya akan disajikan secara sangat insidental.

*Para hadirin yang saya muliakan.*

Untuk menjawab pertanyaan yang pertama dan kedua, kita perlu memahami dengan lebih seksama tantangan perubahan global yang tengah kita hadapi saat ini, dan yang membedakannya dari tantangan yang dihadapi oleh Universitas Gadjah Mada pada awal kelahirannya. Salah satu isu sangat penting yang harus kita pahami adalah bahwa pilihan identitas, jati diri dan nilai-nilai yang dirumuskan oleh para pendiri Universitas Gadjah Mada waktu itu dilakukan di hadapan tantangan hadirnya ancaman kapitalisme dunia dari era yang oleh Robertson (2003) disebut sebagai era globalisasi gelombang pertama dan kedua, dan oleh Gelinis (2003) disebut sebagai era merkantilisme dan era ekspansi kapitalisme kolonial, yang memiliki karakter dan dinamika yang sangat berbeda dari karakter dan dinamika globalisasi yang kita hadapi saat ini dan di masa depan. Kedua, pada saat yang sama, kita perlu melakukan penilaian kritis dan lebih jernih tentang implikasi ekspansi globalisasi gelombang ketiga bagi negara-negara di Dunia Ketiga, terutama implikasinya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan universitas di negara-negara tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, logika yang mendasari ekspansi globalisasi gelombang ketiga diturunkan dari ideologi neo-liberalisme, yang di dalam filsafat politik kontemporer memiliki afinitasnya dengan ideologi libertarianisme yang direntang melampaui batasnya yang ekstrim. Seperti halnya dengan libertarianisme yang membela kebebasan pasar dan menuntut peran negara yang terbatas (Kymlycka, 1999: 95), neo-liberalisme percaya pada pentingnya institusi kepemilikan privat dan efek distributif dari ekspropriasi kemakmuran yang tidak terbatas oleh korporasi-korporasi transnasional, pada superioritas hukum pasar sebagai mekanisme distribusi sumber daya, kekayaan dan pendapatan yang paling efektif, dan pada keunggulan pasar bebas, sebagai mekanisme-mekanisme sangat penting untuk menjamin kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan semua orang dan individu (Gelinis, *op. cit.*, 2003: 24).

Bekerja melalui regulasi yang dilakukan oleh tiga lembaga multilateral yang oleh Richard Peet (2003) disebut sebagai *The Unholy Trinity* (IMF, Bank Dunia, dan WTO), di bawah tekanan ekspansi globalisasi gelombang ketiga, perlahan-lahan akan tetapi pasti, segala sesuatu yang berharga tidak dapat dipertahankan dari komodifikasi dan komersialisasi sistem ekonomi global: termasuk air, bahan pangan, kesehatan, karya seni, dan ilmu pengetahuan, apalagi teknologi. Semua itu terjadi terutama melalui proses marjinalisasi kekuasaan dan otoritas negara-negara Dunia Ketiga di dalam pengaturan ekonomi nasional mereka, yang terjadi dalam lima tahapan perkembangan berikut (Gelinis, *ibid.* 31).

- (1) Deregulasi sistem keuangan internasional Bretton Woods, yang terjadi sejak tahun 1971, dan yang telah mengubah semua aset keuangan dunia ke dalam kapital spekulatif.
- (2) Deregulasi ekonomi Dunia Ketiga secara sistematis dan bertahap, yang terjadi sejak tahun 1980-an melalui program-program penyesuaian struktural (*structural adjustment*) di bawah pengawalan IMF dan Bank Dunia untuk mengintegrasikan negara-negara sedang berkembang ke dalam sistem pasar global.
- (3) Deregulasi *stock markets* yang terjadi sejak tahun 1986 untuk mengatur deregulasi semua *stock markets* di seluruh dunia.

- (4) Deregulasi produksi pertanian dan komersialisasi pelayanan-pelayanan yang timbul sebagai konsekuensi dari perjanjian-perjanjian internasional.
- (5) Proliferasi kemudahan-kemudahan pajak dan perbankan (*tax and banking havens*) sejak pertengahan tahun 1990-an, yang telah menghasilkan separuh dari seluruh aliran keuangan dunia terjadi melalui kemudahan-kemudahan bebas hambatan dari semua bentuk kendala legal oleh karena kekuasaan publik mengikuti ketidakpedulian kebijakan-kebijakan publik.

Semua itu telah menyebabkan globalisasi neo-liberal secara mendasar memiliki dinamika dan implikasi yang sangat berbeda dari dinamika dan implikasi globalisasi gelombang pertama dan kedua. Jikalau di era globalisasi gelombang pertama dan kedua ekstraksi kekayaan negara-negara sedang berkembang dilakukan dengan menggunakan mekanisme "akumulasi primitif" melalui beragam bentuk kekerasan fisik yang terbuka seperti penaklukan dan kolonisasi, perampokan dan perbudakan, serta eksploitasi pertanian dan perdagangan antar benua, maka di era globalisasi gelombang ketiga ekstraksi kekayaan negara-negara Dunia Ketiga dilakukan dengan cara-cara yang sangat lembut dan tersembunyi melalui regulasi sistem perdagangan internasional yang di atas permukaan tampak sangat bebas dan demokratis akan tetapi yang di bawah permukaan sesungguhnya seringkali jauh lebih eksploitatif dan tidak adil. Tidak mengherankan oleh karenanya jikalau keberhasilan globalisasi gelombang ketiga yang telah membawa perkembangan peradaban umat manusia ke tingkat yang selama ini tidak pernah terbayangkan, harus berjalan seiring dengan terjadinya berbagai tragedi kemanusiaan di banyak negara sedang berkembang. Gelinis (*ibid.*: 165-166) menyebut beberapa tragedi kemanusiaan berikut diantara yang paling penting:

- (1) 4 sampai 6 milyar penduduk berada di 127 negara terbelakang di dalam kondisi kemiskinan yang berat;
- (2) 49 negara paling terbelakang secara teknologis mengalami kebangkrutan;
- (3) pendapatan per kapita per tahun dari 100 negara di Dunia Ketiga mengalami penurunan dari keadaan 10, 15, 20 dan bahkan 30 tahun yang lalu;
- (4) 2,8 milyar penduduk di negara-negara Dunia Ketiga hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dollar AS (Amerika Serikat) per hari;
- (5) 1,3 milyar penduduk di negara-negara yang sama bahkan hidup dengan tingkat konsumsi kurang dari 1 dollar AS;
- (6) 2,6 milyar penduduk dunia tidak memiliki infrastruktur sanitasi yang memadai; dan
- (7) 1,4 penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap air minum yang bersih.

Laporan statistik *UN Human Development Report* tahun 1996 (Tehrani, *op. cit.*, 1999: 157) menguatkan semua itu dengan menunjukkan semakin menguatnya tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi dunia melalui penyajian statistik berikut: 20 persen penduduk terkaya di dunia menerima lebih dari 82 persen pendapatan dunia, sementara 20 persen penduduk paling miskin hanya menerima 1,4 persen. Mengutip laporan Rummel tahun 1994, Tehrani menyebutkan pula bahwa sepanjang kurun waktu antara tahun 1900 sampai dengan tahun 1990 telah terjadi sekitar 250 perang antar negara dan perang sipil di berbagai negara yang merenggut kematian lebih dari 100 juta tentara dan 100 juta penduduk sipil. Lebih dari itu, jikalau pada abad ke-18 dan abad ke-19 kematian prajurit yang terjadi dalam peperangan hanya mencapai angka 50 dan 60 orang per 1 juta penduduk dunia, angka itu meningkat secara sangat dramatik pada abad 20 menjadi 460 kematian per 1 juta penduduk dunia.

Kenyataan-kenyataan itu lah yang antara lain telah menjadi alasan Tehrani (1999: 156) untuk menyebut Abad ke-20 sebagai "abad kematian yang direncanakan" (*a century of death by design*). Memasuki akhir Abad ke-20 sejumlah cendekiawan terkemuka bahkan telah menengarai terjadinya "kematian" banyak hal yang selama ini menjadi fondasi dari tata kehidupan dunia (Tehrani, *op. cit.*, 1996): mulai dari "*the end of ideology*" (Bell, 1960), "*the end of history*" (Fukuyama, 1989), "*the end of modernity*" (Mowlana dan Wilson, 1990), "*the end of journalism*" (Katz, 1992), "*the end of geography*" (Mosco, 1994), "*the end of racism*" (D'Souza, 1995), dan "*the end of work*" (Rifkin, 1995), sampai dengan "*the end of university*" (Tehrani, 1996).

*Para hadirin yang saya muliakan.*

### **Revolusi teknologi informasi dan isu "kematian universitas"**

Di dalam kaitannya dengan isu yang terakhir tentang "kematian universitas", yang sangat relevan bagi penyajian tema Orasi Dies kali ini, globalisasi telah membuat universitas di mana-mana di seluruh dunia semakin kehilangan

otonominya sebagai suatu *"culture-conserving"*, *"culture-creating"* dan *"civilizing institution"* di dalam mewujudkan peran dan fungsinya untuk membebaskan umat manusia dari berbagai bentuk penindasan, ketidakadilan dan dehumanisasi, dan sebaliknya untuk mewujudkan misi "liberasi" (*liberation*) dan "pencerahan" (*enlightenment*) bagi kehidupan umat manusia. Sebagaimana yang akan disampaikan lebih jauh pada halaman-halaman berikut, di bawah tekanan globalisasi teknologi informasi *genre* baru, di mana-mana di seluruh permukaan bumi universitas semakin kehilangan otonomi dan kemampuan mereka untuk mewujudkan hampir semua peran dan fungsi tradisionalnya yang sangat esensial untuk melakukan produksi, preservasi, dan transmisi pengetahuan (Noam, 1995), dan pendidikan moral, sosialisasi keilmuan, kritik sosial, serta sertifikasi profesional dan rekrutmen elit (Tehrani, 1996). Melalui kehadiran revolusi teknologi informasi yang telah menciptakan perubahan-perubahan sangat mendasar di dalam struktur organisasi dan mekanisme kerja universitas sejak tahun 1980-an, globalisasi gelombang ketiga bahkan telah menciptakan berbagai paradoks perkembangan universitas yang selama ini belum pernah terjadi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Noam dan Tehrani, di bawah dukungan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, globalisasi telah berhasil mendorong perkembangan pengetahuan ilmiah pada tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi antara 4 sampai 6 persen tiap tahun, yang berarti telah menghasilkan kelipatan pertumbuhan dua kali hanya dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun. Seperti yang terjadi dalam bidang-bidang yang lain, spesialisasi merupakan mekanisme yang bekerja di belakang perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa itu. Salah satu sebabnya yang sangat penting bersumber dalam keterbatasan kemampuan finansial dan sumber daya fisik yang dimiliki oleh universitas, sehingga aktualisasi kemampuan para ilmuwan untuk menguasai pengetahuan yang semakin banyak mengenai bidang-bidang yang semakin sempit terpaksa harus menemukan solusinya dalam pengembangan jaringan dengan lembaga-lembaga eksternal, seperti lembaga-lembaga *"think-tanks"*, konsultasi, korporasi riset dan pengembangan yang dimiliki oleh berbagai departemen dan lembaga-lembaga penelitian pemerintah dan non-pemerintah.

Spesialisasi bidang-bidang ilmu pengetahuan memang merupakan salah satu kekuatan sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi ketika spesialisasi bidang-bidang ilmu pengetahuan berkembang terlalu jauh, apalagi ketika dorongan yang menggerakkannya dikendalikan oleh kepentingan korporasi-korporasi transnasional, maka sistem intelektual yang menjadi tempatnya berpijak akan semakin kehilangan kemampuan esensialnya untuk melihat dan menjelaskan hal-hal berikut: (1) deskripsi tentang keseluruhan kerangka kerja ilmu pengetahuan yang menempatkan beragam disiplin ilmu pengetahuan di dalam hubungan mereka satu dengan yang lain; (2) deliniasi tentang apa yang dapat direpresentasikan oleh setiap disiplin ilmu pengetahuan; (3) perkembangan pemahaman (*insights*) tentang kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan diantara berbagai disiplin ilmu pengetahuan dalam kaitannya dengan kompleksitas sistem paradigmatis yang mendasarinya; dan (4) bagaimana berbagai disiplin ilmu pengetahuan berhubungan sangat erat satu sama lain ketika mereka diterapkan untuk mengungkapkan masalah-masalah tertentu. Yang terakhir memiliki kaitan yang erat dengan isu tentang bagaimana ilmuwan dapat menilai kemungkinan-kemungkinan bahwa bidang-bidang kajian yang mereka lakukan dibangun di atas pertanyaan-pertanyaan yang sesat, dan bahwa penelitian-penelitian mereka dilakukan di atas pilihan penggunaan pendekatan-pendekatan keilmuan yang keliru dan oleh karena itu telah menghasilkan kesalahan-kesalahan pemahaman yang sangat mendasar; dan bagaimana keduanya sangat esensial bagi pengembangan kesahihan metodologi masing-masing disiplin ilmu pengetahuan dan keseluruhan sistem intelektual yang mendasarinya. Apa yang dikhawatirkan oleh Kline (1995) akan dapat terjadi pada perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi di masa yang akan datang.

Sebagai akibatnya, fungsi pertama universitas untuk mengembangkan pengetahuan semakin banyak diambilalih oleh lembaga-lembaga penelitian pemerintah dan/atau swasta yang memiliki dukungan dana yang kuat dan menuntut keahlian yang semakin terspesialisasi. Fungsi pengembangan ilmu pengetahuan yang selama ini secara internal dapat dilakukan universitas melalui kebijakan-kebijakan pengembangan infrastruktur dan iklim akademik, berkat dukungan perkembangan jaringan transportasi dan komunikasi modern, kini harus dilakukan melalui persaingan yang semakin tidak menguntungkan dengan lembaga-lembaga dan jaringan-jaringan pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin banyak berkembang di luar universitas dengan dukungan infrastruktur yang jauh lebih baik dan dana yang lebih besar.

Dampak lebih jauh dari semua perkembangan itu adalah bahwa peran universitas untuk mengintegrasikan perkembangan unit-unit pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya menjadi semakin problematis. Program-program dan pusat-pusat studi yang menjadi ujung tombak universitas di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kini semakin sulit dikendalikan untuk berkembang menjadi "kerajaan-kerajaan" kecil yang memiliki hubungan yang minimal diantara satu dengan yang lain. Di hadapan tawaran dukungan sumber dana yang besar dari luar, tidak jarang bahkan dari lembaga-lembaga dana yang memiliki kaitan dengan kepentingan korporasi-korporasi transnasional, maka program-program dan pusat-pusat studi yang dimiliki universitas akan berkembang mengikuti irama dan dinamika mereka sendiri-sendiri. Sebagai akibatnya, berbagai disiplin ilmu

pengetahuan menjadi semakin tidak dapat berbicara satu sama lain. Disiplin ilmu-ilmu pengetahuan alam, misalnya, yang pada abad limabelas dan enam belas memiliki kebesaran dan superioritas yang sangat tinggi oleh karena para ahlinya pada umumnya memiliki kapasitas sebagai ahli-ahli filsafat yang tidak hanya memiliki penguasaan atas fakta-fakta empiris akan tetapi juga konsep-konsep kemanusiaan yang kuat (Heidegger, 1977), kini semakin tidak dapat berbicara dengan para ahli ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Banyak diantara mereka menganggap para ahli ilmu-ilmu sosial dan humaniora lebih banyak membangun argumen keilmuan mereka di atas opini dan akal sehat yang tidak memiliki dukungan fakta-fakta empiris yang kuat dan terpercaya. Sebaliknya, disiplin ilmu-ilmu sosial yang pada awal kelahirannya berkembang dengan meminjam epistemologi positivisme dari disiplin ilmu-ilmu pengetahuan alam (Etzkowitz, 1991), kini semakin bersikap skeptis terhadap kesahihan fakta-fakta empiris yang "keras" yang dihasilkan melalui penggunaan metode-metode penelitian positivistik-naturalistik, dan oleh karena itu juga menjadi semakin "sulit" untuk berbicara dengan sejawat-sejawat mereka dari disiplin ilmu-ilmu pengetahuan alam. Mereka menganggap banyak ahli ilmu-ilmu pengetahuan alam memberikan kepercayaan terlalu tinggi pada fakta-fakta empiris yang "keras", sebaliknya kurang menaruh perhatian pada pentingnya refleksi dan kontemplasi.

Semua itu telah menyebabkan fungsi liberasi universitas untuk membantu masyarakat melepaskan diri dari berbagai bentuk penindasan, ketidakadilan dan dehumanisasi juga menjadi semakin problematik. Meminjam argumen Schiller (Webster, 1995), di tengah era globalisasi teknologi informasi, di mana-mana di seluruh dunia, terutama di negara-negara Dunia Ketiga, universitas semakin tidak memiliki kemampuan untuk mencegah hadirnya paling sedikit tiga ragam perubahan sangat problematik berikut. Pertama, sebagai implikasi dari perkembangan dan aplikasi teknologi informasi dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, kini universitas harus menyaksikan hadirnya dinamika perkembangan masyarakat yang semakin dikendalikan oleh "kriteria-kriteria pasar". Inovasi-inovasi informasi dan komunikasi baru yang semula diharapkan akan dapat menjadi kekuatan pendorong sangat penting bagi dinamika perkembangan masyarakat di masa mendatang, ternyata telah berkembang semakin dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan pasar di dalam proses pembelian, penjualan, dan perdagangan untuk alasan keuntungan. Sentralitas prinsip-prinsip pasar di dalam ketiga kegiatan itu pada gilirannya telah menghasilkan terjadinya "komodifikasi" dan "komersialisasi" informasi, dan dengan demikian hanya akan menjamin ketersediaan informasi sejauh ia menghasilkan keuntungan; dan bagi para pengguna informasi, hanya akan dapat diperoleh sejauh mereka dapat dan mampu membelinya.

Kedua, globalisasi teknologi informasi juga telah dan akan mengakibatkan masyarakat dan ekonomi kita semakin tumbuh menjadi sebuah "*corporate capitalism*" yang akan semakin didominasi oleh institusi-institusi korporatis di dalam bentuk organisasi-organisasi oligopolistik atau bahkan monopolistik. Ketiga, sebagai hasil dari keduanya, yang telah dan akan kita saksikan semakin transparan di hadapan mata publik adalah meningkatnya kesenjangan kelas (*class inequality*) yang akan semakin menguasai dinamika perkembangan masyarakat dan ekonomi kita di masa mendatang. Kelas, misalnya, akan semakin menentukan siapa yang akan memperoleh jenis informasi macam apa dan dalam jumlah seberapa banyak, serta semua konsekuensi yang ditimbulkannya. Di dalam situasi seperti itu, hanya mereka yang berada pada lapisan atas di dalam struktur sosial masyarakat kita yang akan memperoleh keuntungan yang berarti dari perkembangan teknologi informasi. Dalam konteks pemanfaatannya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hal itu juga berarti bahwa hanya mereka yang berada pada lapisan atas di dalam struktur sosial masyarakat kita yang akan memperoleh keuntungan yang berarti dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Akan tetapi benarkah di mana-mana universitas, termasuk universitas kita, memang tengah menuju ke ambang kematiannya? Jawabnya, sejauh ini, sebagai suatu institusi jelas tidak. Pertama kali kita harus memahami, bahwa penggunaan konsep kematian universitas, seperti halnya dengan konsep kematian ideologi, sejarah, geografi dan lain-lain, jelas hanya dimaksudkan untuk menciptakan suatu "*sense of crisis*" dan "*sense of emergency*" bahwa suatu tindakan atau kebijakan perlu segera dilakukan untuk mencegah menurunnya kemampuan universitas untuk mewujudkan peran dan misi kelebagaannya sebagai institusi pendidikan dan lembaga konservasi dan penciptaan kebudayaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Jean Baudrillard (Tehrani, *op. cit.*, 1996), semua pengertian "kematian" dalam semua konsep yang sudah disebutkan di atas dirumuskan di atas konsep yang bersifat linier. Di era pos-modernisme, demikian menurut Baudrillard, linieritas memang akan selalu berkembang menuju kematiannya. Akan tetapi di seberang kematian itu trajektori-trajektori maknanya akan senantiasa menciptakan ideologi-ideologi baru, sejarah-sejarah baru, geografi-geografi baru, universitas-universitas baru, dan berbagai hal baru yang lain, oleh karena dalam era pos-modernisme setiap kejadian akan menemukan liberasi bagi dirinya sendiri. Dalam konteks tema penyajian Dies kali ini, yang diperlukan dengan demikian adalah tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan untuk melakukan liberasi universitas kita, bukan hanya dari metafora konsep "kematian", akan tetapi lebih-lebih dari kenyataan-kenyataan obyektif dan subyektif yang ditunjuk oleh konsep "kematian" itu. Pada bagian paling akhir orasi ini akan coba dicari dan diungkapkan, menyusul pemaparan tentang problematika kontekstualisasi dan revitalisasi pilihan identitas, jati diri dan nilai-nilai yang sejak awal telah menjadi dasar dari kelahiran Universitas Gadjah Mada.

*Para hadirin yang sangat saya hormati.*

### **Problematika kontekstualisasi dan revitalisasi jati diri Universitas Gasjah Mada**

Untuk menghadapi tantangan sangat berat itu Universitas Gadjah Mada perlu menegaskan kembali "khitahnya" sebagai Universitas Perjuangan, yang secara historis lahir dari kancah revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman dan tekanan perubahan-perubahan global. Penegasan itu sangat diperlukan untuk menghadirkan kembali semangat perjuangan dan nasionalisme yang sejak awal kelahiran Universitas Gadjah Mada telah menjadi obsesi dan orientasi dari misi liberasi dan kemanusiaannya. Penegasan itu juga diperlukan oleh Universitas Gadjah Mada untuk menempatkan dan mengukuhkan kembali fungsinya sebagai wahana integrasi bangsa dan pembentukan identitas "keindonesiaan" bagi segenap civitas akademika, terutama para mahasiswanya, yang akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa di masa depan.. Penegasan yang sama juga memiliki fungsi sangat penting untuk memantapkan kembali peran Universitas Gadjah Mada sebagai institusi "cagar budaya" dan "pengembangan budaya" (*culture-conserving and culture-creating institution*) dalam proses "pengadaban" (*civilizing*), "liberasi" (*liberating*) dan "humanisasi" (*humanizing*) anak bangsa dari berbagai bentuk penindasan, ketidakadilan dan dehumanisasi.

Yang menjadi tantangan kita saat ini dan di masa depan adalah bagaimana, menghadapi konteks globalisasi gelombang ketiga (baca: globalisasi neo-liberal) yang semakin meraja, identitas, jati diri dan nilai-nilai Universitas Gadjah Mada harus dikontekstualisasi dan direvitalisasi? Bagaimana identitas, jati diri dan nilai-nilai itu harus dikontekstualisasikan dan direvitalisasi sehingga aktualisasinya melalui pelaksanaan program-program Tridharma Universitas benar-benar mampu menjawab tantangan perubahan-perubahan global? Bagaimana identitas, jati diri dan nilai-nilai itu harus didefinisikan kembali dan direvitalisasi ke dalam perumusan kebijakan-kebijakan organisasional atau institusional universitas kita? Tidak kalah pentingnya dari semua itu adalah pertanyaan tentang bagaimana kontekstualisasi dan revitalisasi identitas, jati diri dan nilai-nilai Universitas Gadjah Mada harus kita lakukan: melalui pendekatan indoktrinasi dan penataran-penataran seperti yang selama ini kita lakukan, atau melalui dikursus akademik yang lebih demokratis seperti yang seharusnya dilakukan dalam proses produksi dan reproduksi ilmu pengetahuan?

Dalam hubungan semua itu hasil "*Seminar Revitalisasi Nilai-Nilai Luhur Universitas Gadjah Mada*" yang diselenggarakan oleh Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 29 November 2004 sangat penting untuk diperhatikan. Seminar tersebut mengusulkan agar proses kontekstualisasi dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila sungguh-sungguh dilakukan dalam pelaksanaan program-program Tridharma Universitas Gadjah Mada. Dalam pelaksanaan Tridharma yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran, semua mata kuliah yang diajarkan di Universitas Gadjah Mada harus dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial. Kuliah *Studium Generale Pancasila* yang lebih menekankan diskursus akademik untuk mengkontekstualisasikan nilai-nilai dasar tadi harus diberikan pada para mahasiswa pada awal-awal masa studi mereka sebagai mata kuliah wajib. Untuk menjamin terjadinya integrasi antara pelaksanaan Tridharma universitas yang pertama dan kedua, sistem pengajaran melalui penelitian (*teaching through research*) perlu dikembangkan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan perkuliahan di Universitas Gadjah Mada seperti yang pernah diusulkan oleh Arasteh (1966).

Dalam pelaksanaan Tridharma yang kedua, yaitu penelitian, semua kegiatan penelitian yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada harus pula dijiwai nilai-nilai Pancasila. Melalui penyampaian pidato Dies Universitas Gadjah Mada tahun 1954 dan 1955, Prof. Sardjito (dalam Mubyarto, 2004: 131) telah jauh-jauh hari mengungkapkan hal itu, antara lain melalui pernyataannya bahwa:

*Di dalam mengerjakan penelitian yang ditujukan ke arah mencari kenyataan dan kebenaran, seorang peneliti mempunyai sifat menurut corak dari pribadi seorang sendiri-sendiri. Karena kita harus memper-kembangkan UGM yang berdasarkan Pancasila maka seharusnya sikap peneliti UGM harus disesuaikan dengan Pancasila.*

Untuk menguatkan pelaksanaan sistem pengajaran melalui penelitian, hasil-hasil penelitian yang secara kuat mencerminkan nilai-nilai Pancasila perlu ditulis dan diterbitkan sebagai buku-buku teks perkuliahan untuk memberikan contoh-contoh tentang bagaimana jati diri dan nilai-nilai Pancasila menampakkan diri dalam kegiatan-kegiatan penelitian yang mudah dipahami dan diuji oleh mahasiswa.

Dalam pelaksanaan Tridharma yang ketiga, kontekstualisasi dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila harus menampakkan diri dalam pelaksanaan semua program dan kegiatan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM). Dalam bentuk pelaksanaannya selama ini, dharma pengabdian kepada masyarakat memang lebih banyak dilakukan melalui kerjasama antara LPM dan pihak ketiga seperti pemerintah (pusat dan daerah) atau berbagai departemen atau kementerian. Kegiatan pengabdian masyarakat dalam pengertian yang sebenarnya melalui

pelayanan langsung kepada masyarakat seperti yang dilakukan oleh *Land Grant Colleges* di Amerika Serikat perlu pula dikembangkan. Kegiatan itu antara lain dapat dilakukan melalui program pengembangan bibit-bibit berbasis lingkungan untuk melayani kepentingan masyarakat dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Program pelayanan yang sama juga perlu dikembangkan untuk membantu masyarakat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam bidang manajemen dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas usaha kecil dan menengah. Pelaksanaan program PTM (Pengerahan Tenaga Mahasiswa) yang pernah dilakukan pada tahun limapuluhan melalui upaya perintisan Prof. Koesnadi Hardjosoemantri perlu pula dipertimbangkan kembali.

*Para hadirin yang saya hormati.*

### **Universitas Gadjah Mada Menyongsong Hari Depan**

Upaya kontekstualisasi dan revitalisasi jati diri dan nilai-nilai itu tidak akan banyak maknanya jikalau struktur dan mekanisme kelembagaan Universitas Gadjah Mada tidak memberikan kemungkinan bagi aktualisasi semua itu ke dalam praksis penyelenggaraan universitas. Itulah problematika kelembagaan kontekstualisasi dan revitalisasi identitas, jati diri dan nilai-nilai luhur universitas kita, yang juga perlu dirancang dan dicarikan solusinya. Pelaksanaannya mensyaratkan pentingnya dilakukan penyesuaian-penyesuaian struktural dan mekanisme-mekanisme kelembagaan universitas untuk memberikan jaminan tersedianya ruang kelembagaan yang lebih terbuka bagi aktualisasi identitas, jati diri dan nilai-nilai tersebut. Penyesuaian-penyesuaian struktural dan mekanisme-mekanisme kelembagaan universitas yang dimaksud, di satu sisi harus memberikan otonomi bagi perkembangan program-program dan pusat-pusat studi sebagai ujung tombak pengungkapan fungsi universitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi pada saat yang sama juga harus mampu meningkatkan fungsi integratif birokrasi universitas untuk membangun dialog akademik diantara berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan unit-unit kelembagaan yang mengelolanya.

Penyesuaian-penyesuaian kelembagaan tersebut bukan hanya sangat diperlukan untuk memberikan ruang kelembagaan universitas yang lebih terbuka bagi aktualisasi identitas, jati diri dan nilai yang menjadi landasan dan orientasi universitas kita, akan tetapi juga memiliki peran yang sangat penting untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kontekstualisasi dan revitalisasi identitas, jati diri dan nilai-nilai Universitas Gadjah Mada harus dilakukan: sekali lagi, melalui pendekatan indoktrinasi dan penataran-penataran seperti yang selama ini kita lakukan, atau melalui pengembangan dikursus akademik yang lebih demokratis seperti yang seharusnya dilakukan dalam proses produksi dan reproduksi ilmu pengetahuan pada umumnya? Jawabnya, menurut hemat saya sangat lah jelas. Tanpa menolak kenyataan bahwa banyak dosen dan mahasiswa tidak lagi memiliki pengetahuan yang jelas mengenai identitas, jati diri dan nilai-nilai yang telah dirumuskan sebagai landasan dan orientasi universitas kita, upaya untuk melakukan kontekstualisasi dan revitalisasi semua itu di masa depan harus tidak lagi dilakukan melalui pendekatan indoktrinasi atau penataran-penataran seperti yang selama ini kita lakukan.

Meskipun harus diakui bahwa sejumlah dosen senior yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan sejarah kelahiran universitas kita memiliki pemahaman yang lebih otentik tentang nilai-nilai Pancasila sebagai landasan universitas kita, namun mereka tidak seyogyanya diposisikan sebagai ideolog-ideolog yang memiliki hak dan otoritas untuk memberikan indoktrinasi atau penataran-penataran tentang nilai-nilai Pancasila kepada dosen-dosen muda dan para mahasiswa. Sebaliknya, kontekstualisasi dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan idii dan filosofis universitas kita seyogyanya dilakukan melalui proses akademik untuk menurunkan aktualisasinya ke dalam kategori-kategori epistemologis, aksiologis, dan perspektif teoritis bagi berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dalam proses itu para dosen senior memiliki peran penting untuk memberikan referensi tentang sejarah kelahiran Universitas Gadjah Mada, beserta dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasannya.

*Para hadirin yang saya hormati,*

Hasil dari keseluruhan proses tersebut akan memberikan input bagi perumusan kebijakan-kebijakan operasional universitas, yang paling sedikit akan mengungkapkan diri dalam beberapa dataran kebijakan berikut. Pada dataran yang pertama, ia akan mengungkapkan dirinya dalam bentuk kebijakan pengembangan kurikulum, yang di satu sisi kaya dengan muatan nilai-nilai Pancasila, dan pada sisi yang lain memiliki kemampuan untuk mengakomodasi perspektif multidisipliner atau transdisipliner, sehingga setiap mata kuliah dari berbagai program studi akan memiliki kemampuan yang kuat untuk membangun dialog diantara berbagai disiplin ilmu pengetahuan tanpa harus kehilangan fokus perhatiannya pada pengembangan disiplin ilmu pengetahuannya sendiri. Kebijakan yang dimaksud harus secara jelas didesain untuk membongkar dan mengikis monisme atau ketunggalan epistemologis, aksiologis, dan perspektif teoritis yang selama ini sangat menguasai penyelenggaraan hampir semua program studi di Indonesia. Dengan kata lain, yang harus dilakukan adalah suatu kebijakan pengembangan kurikulum bagi berbagai program studi

yang membuka lebar-lebar pilihan beragam tradisi atau epistemologis keilmuan beserta implikasi pilihan-pilihan aksiologis dan perspektif teoritis yang menjadi derivasi atau turunan masing-masing.

Pada dataran yang kedua, pendirian pusat studi baru yang secara khusus dirancang untuk mengembangkan tiga fungsi berikut perlu dilakukan untuk memperkuat sekolah pascasarjana yang bertugas menyediakan pendidikan pascasarjana multi-disipliner. Meminjam dan mengikuti anjuran Daly dan Cobb, Jr. (1998), perumusan kebijakan pengembangan suatu program atau pusat studi yang secara khusus dirancang untuk mengemban fungsi-fungsi berikut merupakan langkah sangat strategis lain yang perlu dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada di masa depan. Fungsi pertama yang harus menjadi pusat perhatian program atau pusat studi tersebut menyangkut kajian-kajian kritis tentang eksistensi universitas kita sebagai suatu institusi "*culture-conserving*", "*culture-creating*"; dan "*civilizing institution*"; tentang sejarah kelahirannya dan cara ia mengorganisasi berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang dikembangkannya; tentang bagaimana ia membangun hubungannya dengan masyarakat tempat ia menjadi bagiannya; tentang sumbangan yang telah dan akan diberikan bagi perkembangan kemanusiaan; tentang kendala-kendala yang menghalangi kebebasan universitas untuk mengungkapkan fungsinya; dan di atas semua itu, tentang kesahihan asumsi-asumsi yang mendasari perkembangan berbagai disiplin keilmuan yang dikembangkannya serta bagaimana asumsi-asumsi yang mereka anut berkaitan satu dengan yang lain dan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Fungsi kedua, yang juga sangat penting bagi aktualisasi misi Universitas Gadjah Mada di masa depan, berkaitan dengan kajian-kajian sistematis tentang isu-isu kosmologi. Fokus perhatian yang harus menjadi obyek kajiannya adalah mengungkapkan pemahaman yang utuh dan bulat tentang kosmologi dunia yang dibangun dari beragam informasi yang diperoleh dari perkembangan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang dikembangkannya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus dijawab harus muncul dari upaya-upaya untuk mengkaitkan apa yang diperoleh dari kajian-kajian kemanusiaan dengan apa yang diperoleh dari kajian-kajian ilmu psikologi, kajian-kajian ilmu sosial, dan kajian-kajian ilmu-ilmu alam. Fungsinya yang ketiga, bertalian dengan kajian-kajian yang secara khusus dan sistematis dirancang untuk melakukan analisis tentang beragam bentuk krisis yang terjadi pada tingkat nasional dan global. Berbagai informasi tentang hal itu memang sudah menjadi perhatian dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan di Universitas Gadjah Mada, akan tetapi semua itu masih belum terintegrasi dalam suatu institusi yang secara khusus berusaha memperoleh pengetahuan yang utuh dan bulat mengenai seluruh persoalan yang sedang dialami umat manusia, dan bagaimana informasi-informasi tersebut berkaitan satu sama lain.

Program atau pusat studi yang dimaksud, sebagaimana dikemukakan oleh Daly dan Cobb, Jr., jelas tidak hanya menuntut dukungan para peneliti yang memiliki kemampuan untuk melakukan analisis lintas disiplin, akan tetapi lebih dari itu bahkan menuntut kemampuan analisis yang ia sebut "non-disipliner". Meskipun program atau pusat studi itu pada awalnya dibentuk sebagai suatu institusi multidisipliner atau transdisipliner, dalam perkembangan jangka panjang menurut mereka harus didorong untuk semakin berkembang menjadi suatu institusi yang bersifat "non-disipliner". Puluhan program atau pusat kajian seperti itu, demikian menurut Daly dan Cobb, Jr., memang sudah dimiliki oleh banyak universitas, akan tetapi karakternya sebagai suatu lembaga kajian multidisipliner, atau bahkan monodisipliner pada umumnya masih terlalu kuat. Tidak terlalu sulit untuk dipahami oleh karenanya jikalau kebijakan kelembagaan yang kedua ini tidak mungkin dapat dikembangkan dengan baik tanpa didukung oleh transformasi kualitas sumber daya profesional dan kualitas prima "*governance*" atau "tata pemerintahan" yang mendukungnya.

Kebijakan kelembagaan universitas yang ketiga menyangkut sistem administrasi penyelenggaraan kegiatan perkuliahan yang terintegrasi pada tingkat universitas untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi mahasiswa untuk merencanakan dan mengembangkan kemampuan akademik dan profesional lintas disiplin yang sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan perubahan-perubahan global yang semakin berat di masa depan. Kebijakan yang dimaksud, yang mulai tahun 2005 sudah akan segera dilaksanakan, jelas menuntut sistem manajemen baru dengan dukungan infrastruktur baru yang masih harus terus dikembangkan.

Kebijakan kelembagaan universitas yang keempat menyangkut kebijakan universitas untuk mengambil partisipasi aktif dalam pengembangan arsitektur proses globalisasi yang lebih pluralistik, dan oleh karena itu lebih "*liberating*" dan lebih "*enlightening*". Secara umum kebijakan yang dimaksud menyangkut strategi untuk secara sadar dan terencana mensubordinasikan logika pasar berdasarkan prinsip efisiensi di bawah nilai-nilai keamanan (*security*), keadilan (*equity*), dan solidaritas (*solidarity*). Dalam ungkapan Karl Polanyi (Bello, 2003: 286), kebijakan tersebut bertalian erat dengan upaya sistematis dan terencana untuk menempatkan sistem ekonomi di bawah kendali sistem sosial masyarakat, dan bukan membiarkan perkembangan masyarakat di bawah kontrol sistem ekonomi.

Dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, kebijakan yang dimaksud menyangkut pertanyaan tentang apakah produksi dan distribusi pengetahuan akan terus dibiarkan berada di bawah monopoli kepentingan-kepentingan korporasi untuk motif-motif keuntungan melalui regulasi GATT/WTO berdasarkan perjanjian TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights*), atau ia harus diserahkan kepada "*domair*" publik dan dipergunakan untuk mengakhiri kemiskinan, kelaparan dan penyakit. Melalui regulasi itu, TRIPs mewajibkan semua

anggota WTO untuk memberikan monopoli kepada pemegang hak paten atas penemuan-penemuan mereka—yang pada umumnya berupa korporasi-korporasi raksasa dari negara-negara Utara. Sayangnya, TRIPs dan perjanjian-perjanjian perdagangan internasional yang lain menuntut syarat-syarat perlindungan hak paten yang terlalu tinggi untuk diikuti oleh agen-agen pengembangan ilmu pengetahuan di negara-negara sedang berkembang. Sebagai konsekuensi logis dari persyaratan yang demikian, maka regulasi GATT/WTO tentang hak paten telah menyebabkan terjadinya paling sedikit akibat-akibat berikut yang sangat merugikan masyarakat di negara-negara Dunia Ketiga:

- (a) pengecualian atau pengabaian masyarakat miskin dari akses terhadap barang-barang pemenuhan kebutuhan dasar, seperti obat-obatan, bibit tanaman, dan pendidikan;
- (b) memperkuat kesenjangan teknologi antara negara-negara industri maju dengan negara-negara sedang berkembang;
- (c) mempertajam kesenjangan pasar hasil-hasil penelitian dan pengembangan (R&D) ke arah barang-barang bagi konsumen-konsumen yang kaya daripada barang-barang kebutuhan dasar bagi orang-orang miskin;
- (d) memperburuk kesenjangan yang sama melalui konsentrasi kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) obat-obatan yang lebih menguntungkan bagi penyembuhan penyakit-penyakit degeneratif daripada penyakit-penyakit menular yang lebih banyak menimpa penduduk miskin;
- (e) membatasi kemampuan negara-negara miskin untuk melakukan inovasi-inovasi dan untuk berpartisipasi dalam pasar global; dan
- (f) mendorong terjadinya perampokan (*piracy*) sumberdaya-sumberdaya biologis dan pengetahuan tradisional petani-petani dan masyarakat lokal di negara-negara sedang berkembang.

*Para hadirin yang saya hormati,*

Meskipun konstelasi kekuasaan global yang ada saat ini tidak memungkinkan Universitas Gadjah Mada, seperti halnya dengan banyak universitas di negara-negara Dunia Ketiga, untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang kuat untuk menggoyahkan arsitektur kekuasaan global di bawah monopoli GATT/WTO, namun dalam perspektif jangka panjang melalui pengembangan forum dan jaringan kerjasama regional dan internasional memiliki ruang yang cukup lebar untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang berarti. Keberhasilan Forum Sosial Dunia (*World Social Forum*) menggagalkan pertemuan WTO di Seattle, USA (Madeley, 2002) yang diagendakan untuk memperketat regulasi perdagangan bahan pangan, memberikan bukti yang cukup otentik. Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Forum Rektor Indonesia yang beranggotakan 2300 perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat telah menginisiasi kerjasama antar universitas (di tingkat nasional, regional dan internasional untuk mendesak Pemerintah Indonesia agar mempertimbangkan kembali rencana WTO untuk memasukkan "pengetahuan" sebagai salah satu kategori "komoditi" ke dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS) yang akan ditandatangani pada bulan Mei tahun 2005. Bila langkah tersebut dilaksanakan dalam sinergi yang kokoh dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh berbagai konsorsium universitas-universitas di Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropah, India, dan Jaringan Universitas ASEAN, keberhasilan kebijakan yang dimaksud dapat diharapkan akan dapat mengikuti keberhasilan Forum Sosial Dunia dalam bidang pertanian..

Yang diperlukan adalah konsistensi perjuangan bersama kekuatan-kekuatan internasional yang progresif untuk membangun sinergi kebijakan-kebijakan mereka bagi reformasi tata pemerintahan global yang lebih pluralistis, lebih demokratis dan lebih adil. Dalam hubungan itu saran Mochtar Mas'od yang disampaikan pada "*Seminar Revitalisasi Nilai-Nilai Luhur Universitas Gadjah Mada*", menurut hemat saya perlu kita perhatikan. Meminjam ungkapan Sutan Takdir Alisjahbana, Mohammad Hatta, dan para ahli Hubungan Internasional, ia menyarankan agar perumusan dan pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan di atas landasan semangat atau strategi "Layar Terkembang", "Mendayung Diantara Dua Karang", dan "*Prudential Diplomacy*", serta keberanian untuk melakukan banyak eksperimentasi.

*Para hadirin yang saya hormati,*

Dewasa ini UGM sebagai Universitas Perjuangan, Universitas Kerakyatan serta nama-nama lain yang berkaitan dengan jati dirinya, ternyata belum terlalu berhasil melaksanakan amanat Pemerintah maupun meneladai para pendirinya mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai dasar bangsa. Upaya-upaya sistematis untuk lebih meningkatkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar tersebut oleh segenap warga UGM dan pengamalannya dalam pelaksanaan misi Tridharma harus terus diupayakan. Lunturnya jati diri UGM dalam kiprahnya dalam pelaksanaan dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sebagian disebabkan karena warga UGM khususnya, dan warga akademik Indonesia umumnya, tanpa sadar selalu "mengekor" perkembangan ilmu-ilmu yang berasal dari negara Barat. Erosi jati diri UGM menjadi bertambah cepat akibat pelaksanaan spesialisasi ilmu yang terlalu awal dan terlalu jauh. Kita mungkin dapat menarik pelajaran dari percakapan Prof. Sardjito dengan seorang tamunya dari Amerika Prof. Thayer mengenai bahaya spesialisasi ilmu yang berlebihan:

*In your country, as well as in mine, it is being realized that too strong a trend toward specialization may be a dangerous thing for society. It is to be noted that an educational program devoted almost exclusively to specialization is likely to have the effect of separating people from people, not of bringing them together* (dalam Mubyarto, 2004:160).

Agar UGM tidak terperosok kembali pada jebakan overspesialisasi ilmu, ia harus berani menerapkan pendekatan interdisipliner dan transdisipliner dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian akan dapat diperoleh manfaat sinergis yang lebih besar, bukan saja untuk ilmuwan dan praktisi, tetapi juga bagi masyarakat dan bangsa. Untuk memfasilitasi tercapainya manfaat sinergis tersebut, proses pembelajaran harus berubah, dari metode konvensional "*banking education*" menjadi metode "*problem-posing education*" yang lebih merangsang kreativitas mahasiswa. Pada metode pertama dosen hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada mahasiswa dan mahasiswa hanya pasif mendengar. Melalui metode kedua mahasiswa dilatih untuk selalu berhadapan dengan masalah nyata yang dicoba dipecahkan bersama-sama oleh dosen dan mahasiswa.

Revitalisasi jati diri UGM yang merupakan totalitas dari nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, persatuan bangsa, dan keadilan sosial, merupakan momentum historis yang penting bagi UGM pada usianya yang ke-55 tahun. Dalam kondisi bangsa Indonesia sedang dilanda berbagai krisis yang nyaris menenggelamkan jati diri bangsa, UGM harus berdiri di garis depan memelopori upaya penyusunan pemikiran-pemikiran keilmuan yang dilandasi oleh nilai-nilai yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. "Pemikiran Bulaksumur" dalam semua disiplin ilmu dan dalam semua bidang yang menyentuh kehidupan rakyat adalah langkah konkret kita untuk menempuh jalan lain yang tidak semata-mata merupakan foto-kopi dari pemikiran negara maju dan dengan memperhatikan keadaan dunia serta prediksi masa depan. Hanya dengan keberanian untuk memerdekakan diri dari pasungan pemikiran bahwa ilmu pengetahuan adalah universal dan *value free*, kita seluruh warga UGM akan mampu mengemban amanat dan memenuhi harapan para pendiri agar lembaga ini selalu menjadi sumber inspirasi bagi rakyat sebagaimana disampaikan oleh Presiden Soekarno pada upacara persesmian Gedung Pantjadharma yang lebih dikenal sebagai Gedung Pusat UGM.

Saya sependapat dengan Profesor Mubyarto bahwa penempatan kata 'kemerdekaan' sampai 7 kali pada Pembukaan UUD 1945 bukanlah tanpa makna, tetapi ingin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia di atas segalanya amat menghargai kemerdekaan dalam segala bidang, termasuk kemerdekaan berfikir. Marilah kita hayati betul semangat kemerdekaan tersebut, kita merdekakan pemikiran-pemikiran kita dari pasungan sindrom '*the very value of secularity*' dan '*barbaric specialization*' agar kita, warga UGM, mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran keilmuan yang cemerlang yang dijiwai oleh nilai-nilai perjuangan yang diamanatkan oleh para pendiri perguruan tinggi kebanggaan bangsa Indonesia.

*Para hadirin yang saya hormati,*

Demikianlah pokok-pokok pemikiran Universitas Gadjah Mada yang telah dikembangkan oleh para pemukanya sejak perguruan tinggi ini didirikan. Dalam perjalanan selama 55 tahun, pemikiran-pemikiran yang dijiwai oleh nilai-nilai dasar bangsa tersebut pernah mencuat tinggi seperti disampaikan dalam pidato, tulisan dan perbuatan nyata para pimpinan dan warga terhormat Universitas Gadjah Mada. Pernah, hampir selama 40 tahun, nilai-nilai dasar bangsa tersebut tenggelam, tidak lagi menjiwai pemikiran dan perbuatan para warga kita. Sekarang, pada hari kelahirannya yang ke-55, perlu kita teguhkan kembali pandangan teleologis Universitas Gadjah Mada untuk menjadikan nilai-nilai dasar bangsa sebagai jiwa bagi pemikiran dan tindakan kita. Hanya dengan demikian kita warga Universitas Gadjah Mada akan mampu menjalankan misi yang diamanatkan oleh para pendiri yaitu menjadi perguruan tinggi nasional terunggul untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi sumber inspirasi bagi rakyat. Itulah jati diri Universitas Gadjah Mada.

Pada kesempatan yang amat baik ini dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah mencurahkan pikirannya untuk penyusunan Orasi ini. Akhirnya, atas kesabaran para hadirin mengikuti paparan yang amat panjang ini saya ucapkan terima kasih.

*Billahit taufiq wal hidayah*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Arasteh, A. R. 1966. *Teaching Through Research*, Leiden: E.J. Brill.
- Bessis, Sophie. 2003. *Western Supremacy: The Triumph of an Idea?*, London & New York: Zed Books.
- Bowles, Samuel and Herbert Gintis. 1976. *Schooling in Capitalist America: Educational Reform and the Contradictions of Economic Life*, New York: Basic Books, Inc., Publishers.
- Daly, Herman E. and John B. Cobb, Jr. 1989. *For the Common Good: Redirecting the Economy Toward Community, the Environment, and a Sustainable Future*. Boston: Beacon Press.
- De Groof, Jan, Gracienne Lowwers and Germain Dondelinger. 2004. *Globalization and Competition in Education*. Amsterdam: Wolf Legal Publishers.
- Etzkowitz, Henry and Ronald M. Glassman. 1991. *The Renaissance of Sociological Theory: Classical and Contemporary*, Illinois: F.E. Peacock Publishers, Inc.
- Freire, Paulo. 1986. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Praeger.
- Gelinas, Jacques B. 2003. *Juggernaut Politics: Understanding Predatory Globalization*, London & New York: Zed Books.
- Hatta, Mohammad. 1989. *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Heidegger, Martin. 1977. "Modern Science, Methaphysics, and Mathematics", dalam Krell, David F. *Martin Heidegger Basic Writings: From Being and Time (1927) to The Task of Thinking (1964)*, London and Henley: Routledge & Kegan Paul.
- Kline, Stephen J., 1995, *Conceptual Foundation for Multidisciplinary Thinking*, New York, NY: Zed Books.
- Kymlycka, Will. 1999. *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*, Oxford: Clarendon Press.
- Madeley, John, 2001, *Hungry for Trade: How the Poor Pay for Free Trade*. New York, NY: Zed Books.
- M. Sardjito. 1956. "Pidato Pada Pemberian Gelar Honoris Causa Oleh Universitas Gadjah Mada Kepada Ki Hadjar Dewantara", Universitas Gadjah Mada.
- \_\_\_\_\_. 1960. "Pidato Pembukaan Rapat Senat Terbuka pada Peringatan Dies Natalis XI", Universitas Gadjah Mada.
- Mubyarto. 2004. *Pancasila Dasar Negara, UGM dan Jati Diri Bangsa*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Nelson, Jack L., Kenneth Carlson, and Stuart B. Palonsky. 1996. *Critical Issues in Education: A Dialectic Approach*, New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Noam, Eli M. 1995. "Electronics and the Dim Future of the University", dalam *Science*, Vol. 270, pp 247-249.
- O'neil, William F. 2001. *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 1981. *Educational Ideologies: Contemporary Expressions of Educational Philosophies*, Santa Monica, California: Goodyear Publishing Company, Inc.
- Robbins, Peter. 2003. *Stolen Fruit: The Tropical Commodities Disaster*, London & New York: Zed Books.
- Robertson, Robbie. 2003. *The Three Waves of Globalization: A History of a Developing Global Consciousness*, London dan New York: Zed Books
- Smiers, Joost. 2003. *Arts under Pressure: Protecting Cultural Diversity in Age of Globalization*. London and New York, NY: ZedBooks.
- Tehrani, Majid. 1999. *Global Communication and World Politics: Domination, Development, and Discourse*, Linne Rienner Publishers.
- \_\_\_\_\_. 1996. "The End of University", reproduced with permission by Taylor and Francis, Inc, <http://www.routledge-ny.com>.
- Webster, Frank, 2002, *Theories of the Information Society*. New York, NY: Routledge.